

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan istimewa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, pemerintah pusat menyediakan pendanaan berupa Dana Keistimewaan untuk pelaksanaan urusan Keistimewaan DIY sesuai dengan kebutuhan DIY yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketika Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan telah disahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta semakin kuat kewenangan keistimewaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya.

Dalam UU keistimewaan DIY bahwa kewenangan istimewa tersebut meliputi tentang urusan-urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Pertanahan; Urusan Kelembagaan; Urusan Tata Ruang ; dan Urusan Kebudayaan. Penyerapan anggaran dana keistimewaan tersebut digunakan dalam urusan keistimewaan, yaitu 57,39%; untuk Urusan Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 31,92% untuk Urusan Pertanahan; 80,20% untuk Urusan Kelembagaan; 65,42% untuk Urusan Tata Ruang; sedangkan 71,43% digunakan untuk Urusan Kebudayaan. Total penyerapan anggaran dana keistimewaan pada tahun 2014 sendiri sebesar 64,88% atau kurang lebih sekitar 271 miliar dari 523 miliar yang di anggarkan pada alokasi dana keistimewaan (Sakir, S., & Mutiarin, D.

2016). Harapan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan adanya UU keistimewaan tersebut dapat memberi peningkatan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.

Proses pembentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran danais merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berdiri sendiri. Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh pihak-pihak luar (stake holder). Hal tersebut misalnya disebutkan oleh Suharno (2010: 52) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya pengaruh dari kelompok luar.

Dalam hal pembuatan kebijakan penyusunan Danais, antara lain dipengaruhi oleh keberadaan pesantren. Pondok pesantren (ponpes) sebagai salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu pesantren di Yogyakarta yaitu pesantren Al-munawwir Krapyak merupakan salah satu pesantren di Yogyakarta yang memiliki hubungan sejarah sangat dekat dengan Kraton. Dari segi historis, pesantren merupakan salah satu institusi yang tidak terpisahkan dengan keberadaan Kraton Yogyakarta.

Hubungan Keraton Yogyakarta dengan institusi pesantren dapat ditelusuri hingga pertama kali berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Berdirinya kerajaan Yogyakarta ini, tidak terlepas dari Islam lainnya. Lahirnya Kraton Yogyakarta tidak lepas dari perjanjian Giyanti 1755 yang merupakan sebagai

pewaris dan juga bagian sejarah Islam di Mataram. Pangeran Mangkubumi menetapkan dirinya sebagai raja dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono I. Berdirinya Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian menjadi titik awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan memiliki sistem pemerintahan sendiri sebagai kerajaan baru. (Baskoro dan Sunaryo, 2011:33)

Budaya yang terbentuk dengan tradisi Islam pada masyarakat Yogyakarta erat kaitannya dengan awal masuknya Islam di Jawa, yang berawal pada sejarah kerajaan Demak dan kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam kedua (Hariwijaya, 2007). Pesantren merupakan pelopor dan juga alat sosialisasi Islam bahkan pada zaman kolonialisme di Indonesia, pesantren juga ikut berperan dalam terwujudnya faktor keadaan kemerdekaan bahkan tidak hanya menjadi wadah pendidikan dan dakwah.

Oleh karena itu, dalam berbicara Kraton Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan institusi pesantren. Keduanya tidak dapat dipisahkan perannya, dalam membangun identitas Jogja. Selain Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pesantren merupakan pilar identitas Yogyakarta. Sejak dahulu, Kraton dan Pondok-Pondok Pesantren berkolaborasi membangun generasi penerus yang berkualitas. (jogjadaily.com, 2015).

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional. (Horikoshi,

dalam Hidayatulloh. 2016). Sehingga baik secara langsung maupun tidak banyak pesantren yang melibatkan diri dan dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, simbiosis mutualisme pesantren dan masyarakat mengalami pasang surut. Pasang surut tersebut misalnya terungkap dalam pernyataan Habib Syakur yang diungkapkan dalam sebuah kesempatan pertemuan antara pimpinan pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) DIY bertemu dengan GKR Hemas di Kraton disampaikan bahwa saat ini dirasakan adanya gap antara pemerintah dengan pesantren. (newsdetik.com, 2017)

Menurut Habib Syakur sebagai salah satu perwakilan dari pesantren yang disampaikan di hadapan GKR Hemas bahwa pemerintah daerah belum memberikan akses yang luas terhadap Dana Keistimewaan (danais) DIY guna mendukung pembangunan masyarakat. Menurutnya, pesantren di DIY yang berjumlah sekitar 258 memiliki kontribusi baik dibidang pendidikan maupun ekonomi. Pesantren memiliki peran dalam pembangunan masyarakat. Sebagai perwakilan dari Pesantren di DIY, dia menyampaikan harapannya secara langsung ke GKR Hemas agar pemerintah memberi akses danais ke pesantren. Akses tersebut diharapkan untuk mengoptimalkan peran pesantren terhadap pembangunan masyarakat. (newsdetik.com, 2017)

Pesantren yang menjadi salah satu pilar identitas Yogyakarta dengan keterlibatan-keterlibatan dan andil adalah sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian “**Power**

Pondok Pesantren Dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Almunanwir Krapyak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, sebagai fokus penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan adalah sebagai berikut: Bagaimana Power Pondok Pesantren dalam Mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui power Pondok Pesantren Al-munawwir Krapyak dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangsih pemahaman power pondok pesantren Al-munawwir krapyak dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan sehingga dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana power pondok pesantren Al-munawwir Krapyak dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik terdiri atas dua kata yaitu kebijakan dan publik. Carl J Federick (dalam Leo Agustino, 2008: 7) mengartikan kebijakan dengan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan merupakan proses panjang mulai dari pengusulan, perumusan kebijakan, dan memiliki maksud tertentu.

Istilah kebijakan merupakan terminology yang banyak dibicarakan oleh ahli. Para ahli berbeda pendapat tentang pengeritan dari pada kebijakan ini. Oleh karena itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) tentang pengertian-pengertian kebijakan yang diberikan oleh para ahli, maka kemudian dirangkum ke dalam sepuluh (10) hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan berbeda dengan keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Sementara itu, Budi Winarno (2007 : 15) memberikan batasan tentang pengertian kebijakan (*policy term*). Menurut Budi Winarno bahwa kebijakan memiliki pengertian yang sangat luas. Istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk pada pengertian yang luas. Akan tetapi, menurut Budi Winarno bahwa istilah kebijakan dan tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* seringkali dipertukarkan. Oleh karena itu, ada kesulitan tersendiri dalam memahami arti kebijakan.

Adapun pengertian kebijakan publik menurut Budi Winarno (2002: 17) mengutip pendapat Pressman dan Widavsky yaitu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik berbeda dengan bentuk-

bentuk kebijakan yang lain seperti kebijakan swasta. Perbedaan tersebut disebabkan karena keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Berbeda dengan Pressman dan Widavsky sebagaimana disebutkan di atas, Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik yaitu merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Berdasarkan pengertian ini yang dimaksud dengan kebijakan publik yaitu mekanisme kerja yang terjadi dalam lingkungan pemerintah.

Menurut Thomas R Dye kebijakan publik yaitu “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan mengenai perwujudan dari pada tindakan, dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Thomas R Dye memandang bahwa pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah yang tidak melakukan sesuatu yaitu memiliki dampak yang sama apabila pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi

kepentingan publik. Termasuk kebijakan public juga diamnya pemerintah atas suatu permasalahan. Kebijakan publik bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kerja pemerintah melalui berbagai tahapan atau proses dalam pembuatannya. Kebijakan publik tersebut dibentuk dengan proses yang kompleks. Banyak banyak proses maupun variabel yang harus dikaji sebelum membentuk kebijakan publik. Beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) membagi tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik ke dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1) Tahap penyusunan agenda

Proses pembentukan kebijakan publik pada tahap awal yaitu dimasukkan ke dalam agenda. Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Untuk sampai pada tahap ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pejabat publik sangat banyak sekali. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut diseleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bermacam-macam, tergantung pada prioritas yang dimiliki oleh pejabat publik. Bisa juga pertimbangan politik dari para pejabat publik dalam membuat kebijakan publik. Selanjutnya, beberapa masalah yang dimasukkan ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada proses ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Pejabat publik menyusun agenda publik ini berdasarkan prioritas-prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

2) Tahap formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan penyusunan kebijakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang mudah diterjemahkan oleh pelaksana kebijakan. Formulasi kebijakan memiliki kedudukan penting dari rangkaian atau tahapan kebijakan publik tersebut. Permasalahan yang diangkat ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan.

Permasalahan tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang tersedia. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif diletakkan di atas

meja untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dan strategis daripada pengambil kebijakan. Dalam tahap ini masing-masing aktor yang berkontribusi pada perumusan kebijakan akan mengusulkan opsi pemecahan masalah terbaik sesuai dengan pendekatan dan kepentingannya sendiri-sendiri.

3) Tahap adopsi kebijakan

Selanjutnya adalah tahapan adopsi kebijakan. Formulasi rumusan akhir daripada kebijakan publik tersebut selanjutnya akan diadopsi sebagai sebuah kebijakan. Adopsi kebijakan tersebut setelah muncul berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan. Pada akhirnya pengambil kebijakan akan mengambil salah satu dari alternatif kebijakan dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

Adopsi kebijakan tersebut merupakan cerminan dari kesepakatan antar pihak di dalam pengambil kebijakan. Adopsi kebijakan tersebut biasanya dituangkan ke dalam surat keputusan dan atau kebijakan daripada pengambil kebijakan publik di lingkungan pemerintahan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Pembuatan kebijakan publik tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi. Suharno (2010: 52) mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks. Para administrator dalam institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian khusus dalam membuat

kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan memiliki resiko-resiko tertentu. Membuat kebijakan harus mempertimbangkan resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut baik resiko diharapkan (*intended risks*) atau resiko yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Menurut Suharno (2010), pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil oleh lembaga pembuat keputusan lahir dari keinginan internal maupun eksternal organisasi. Keinginan internal misalnya adanya kajian mendalam terhadap permasalahan publik kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kebijakan. Adakalanya kebijakan publik juga dibentuk karena adanya tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

Pembuat kebijakan publik tidak dapat menghindari adanya tekanan-tekanan dari luar yang membuat sebuah kebijakan publik dibuat. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kepentingan yang bergantung pada keputusan lembaga publik

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebijakan publik pada umumnya juga adalah kelanjutan dari tradisi lama. Oleh Karena itu, kebijakan publik adakalanya dibuat karena adanya kebiasaan lama dari institusi atau di luar institusi.

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang belum professional dan terkadang amat birokratik. Kebiasaan, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Kebijakan publik sebagai proses dialektis yang panjang yang terjadi pada individu maupun dalam institusi organisasi pembuat kebijakan tersebut adakalanya tidak bisa lepas dari sifat-sifat pribadi yang ada di dalamnya. Sifat pribadi merupakan faktor yang turut serta berperan dalam penentuan keputusan/kebijakan. Dominasi karakter dari individu dalam pembuatan kebijakan publik biasanya dapat dilihat dari tipe kepemimpinan dalam organisasi.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan publik adalah kristalisasi keinginan berbagai pihak, kemudian lahirlah kebijakan publik. Oleh Karena itu, kebijakan publik biasanya juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di luar organisasi.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar dirinya. Kelompok luar merupakan salah satu yang disebut dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Tekanan yang diberikan oleh kelompok luar (pressure group) ampuh dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang diinginkan.

2. Teori Power

Teori power digunakan untuk menjelaskan power dari pondok pesantren Al-munawwir Krpyak dalam perumusan alokasi dana keistimewaan dan berdasarkan konsep teori, pada akhirnya akan dapat menyimpulkan dari fakta yang ada di lapangan, bagaimana power pondok pesantren Al-munawwir Krpyak dalam perumusan alokasi dana keistimewaan.

Selanjutnya, power ditafsirkan mengandung maksud bagaimana sebuah kemampuan dapat mempengaruhi orang lain agar dapat menuruti

kehendaknya. Sesuai dengan alur berpikir tersebut, Mariam Budiardjo dalam karangannya mengartikan kekuasaan atau power yaitu “kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku” (Miriam Budiardjo, 2008:17-18). Hal tersebut sesuai dengan definisi kekuasaan atau power menurut Andrew Heywood bahwa

“Power is thought of as relationship, as the exercise of control by one person over another or as power over” (Andrew Heywood, 2004:122).

Menurut Andrew, kekuasaan atau power merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok yang tanpa diketahuinya, lebih-lebih *power over* dapat dipunyai seseorang atau kelompok lain yang terjadi dari hubungan kuasa akan tetapi tidak disadari samasekali pada sebelumnya. Serupa seperti Manual Castells (2009) :

“Power is the relational capacity that enables a sosial actor to influence asymmetrically the decisions of other sosial actor(s) in ways that favor tah empowered actor’s will, interest and values”

Power yaitu kemampuan seseorang selaku aktor sosial guna mempengaruhi orang lain atau aktor sosial lainnya dalam menetapkan keputusan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Power juga dapat ditafsirkan sebagai kecakapan mengendalikan orang lain supaya mengikuti keinginan dan kepentingan yang kita inginkan. Power tidak datang begitu saja berkaitan untuk dapat mencapai tujuan menguasai orang lain.

Power dapat dicapai melalui tiga cara yaitu: Pertama, Kekerasan (*force*) yaitu contoh kekuasaan yang kejam seperti tindakan mengancam dari kalangan pondok pesantren; Kedua, Koersi (*coercion*) dengan asas sanksi atau menggunakan tekanan jika tidak mengikuti atau mengerjakan, pola ini tata tertib dan tugas santri di pondok pesantren sebagai contoh nyata dimana ketidak taatan santri akan mendapatkan sanksi atau hukuman; Ketiga, Persuasi (*persuasion*) usaha untuk mempengaruhi membujuk secara halus dan tersirat berdasarkan fakta dan pendapat ahli.

Kekuasaan (*power*), selain hal itu juga didapatkan oleh seseorang karena orang tersebut mempunyai *reosources*, mempunyai materi atau kekuasaan sebagai modal awal kuasa yang diperoleh secara histori memanfaatkan ketentuan dari keturunan bangsawan, kiyai maupun prinsip *aristocrat* lainnya.

Menurut JRP French an Beatram Raven, 1974 (dalam Syafiie, 2004) kekuasaan (*power*) dapat timbul atau berasal dari *legitimate power*, *coercive power*, *reward power*, *expert power* dan *reverent power*. Selain hal tersebut, pengarang lain juga menambahkan *information power* dan *connection power*.

Legitimete power adalah kekuasaan (*power*) yang didapat karena memperoleh surat keputusan, atau sesuai pada prosedur yang berlaku atau keabsahan hukum. *coercive power* adalah sebuah kekuasaan yang didapat dengan menunjukkan kekerasan dalam berbagai pengurusan maupun kepemimpinannya ataupun dengan ancaman. *Reward power* merupakan

kekuasaan yang didapat karena pemberian dari seorang penguasa, *expert power* adalah kekuasaan yang didapat oleh seseorang dikarenakan memiliki sebuah kemampuan atau keahlian tertentu sehingga keahliannya dibutuhkan oleh orang lain sebagai awal kekuasaan, *reverent power* adalah kekuasaan yang didapat oleh seseorang karena memiliki daya tarik atau memiliki karisma tersendiri yang membuat kagum, *information power* adalah sebuah kekuasaan yang didapat karena mempunyai sebuah informasi sehingga dirinya dibutuhkan oleh orang lain, sedangkan *connection power* yaitu merupakan kekuasaan yang didapat karena memiliki hubungan yang luas dengan orang lain atau memiliki koneksi.

Selanjutnya Steven Luks (2005) mengembangkan konsep tentang ukuran-ukuran kekuasaan. Ia mengelompokkan power ke dalam tiga bentuk yaitu :

a. *Decision Making (Direct)*

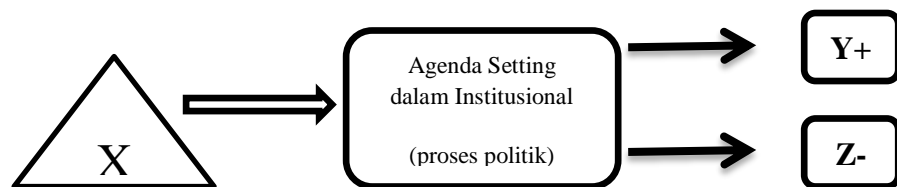
Decision Making dapat dirasakan dan dapat dilihat secara nyata atau dapat dikatakan kekuasaan (*power*) seseorang memiliki sifat langsung (*direct*) terhadap orang lain karena dasar utama kuasa yang ia miliki. Cukup sederhana untuk cara kerjanya dan bersifat nyata. Berikut gambaran cara kerja dari bentuk ini



Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa X sebagai *decision maker* yang mempunyai modal kekuasaan sehingga ia mampu untuk mempengaruhi Y dan secara langsung lalu Y melanjutkan pada Z yang pada akhirnya Y dan Z akan sama-sama berada di bawah kendali dari X.

b. *Agenda Setting (Indirect)*

Kekuasaan (power) dalam bentuk model *agenda setting (indirect)* seperti ini bersifat tidak langsung, bentuk model seperti inipun condong memiliki sifat politis yang besar, mengapa dikatakan demikian karena bentuk model ini lebih untuk mempengaruhi dalam kebijakan agar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan minatnya, untuk lebih memahami hal berikut sebagai gambaran untuk bentuk kerja model ini

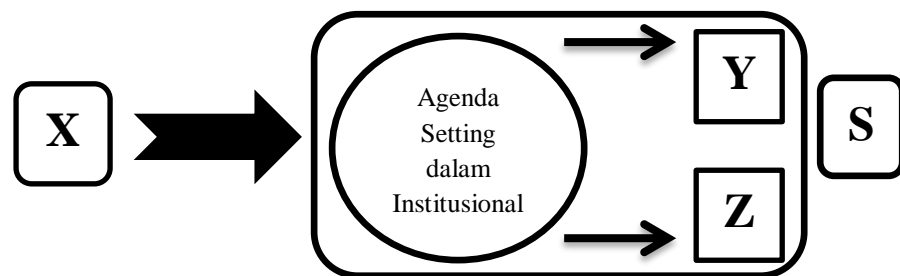


Mencoba menjelaskan dari gambaran diatas X yang mengenakan pengaruh pada jalannya proses politik dalam institusi negara dengan cara tidak langsung (*indirect*) karena tidak terlibat langsung dalam sebuah proses intitusional, untuk menghasilkan kebijakan sesuai dengan apa yang di inginkan, gambar Y+ (hasil)

yang artinya apa yang diinginkan sesuai dengan rencananya, lalu untuk gambar Z- (hasil) yang artinya *power* dari X belum mampu untuk mempengaruhi proses politik yang berbeda dengan hasil gambar Y+.

c. *Thought-Control* (Tanpa sadar)

Kekuasaan (*power*) pada bentuk pola ini berbeda dengan pola sebelumnya, karena pada pola kali ini kian bertambah lembut dan tidak dapat dirasai, dapat dikatakan juga kekuatan untuk mempengaruhi lebih dalam langsung secara inti baik secara ideologis yang dirancang hingga mendalam dengan kekuatan yang menghegemoni sedemikian rupa. Berikut gambaran cara kerja bentuk pola ini



Cara kerja dari bentuk model *thought-control* lebih kompleks dari pada dua bentuk model sebelumnya, dapat dilihat pada gambar bahwa X mencoba untuk mensiasati *grand planing* melalui proses politik yang sesungguhnya ia kuasai dengan kekuatan (*power*) yang telah ia punyai untuk menghasilkan suatu kebijakan antara Y ataupun Z yang keduanya merupakan sam-sama hasil yang diinginkan dan

telah direncanakan pada sebelumnya, sementara S merupakan hasil yang tidak diinginkan oleh X dan garis lingkaran besar merupakan upaya untuk menjelaskan ketika kebijakan yang dihasilkan itu keluar dari lingkaran tersebut artinya *out of expectation* seperti pada gambar S yang berada pada luar lingkaran. Ringkasnya Y dan Z merupakan hasil yang diinginkan Oleh X melalui proses politik pada lembaga institusional.

3. Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengkhususkan sebagai tempat menempa pendidikan Islam yang memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Menurut Dhofier (1990:50), pondok pesantren ditandai dengan adanya santri yang tinggal bersama dalam suatu kompleks dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai.

Menurut Abdurrahman Wahid (dalam Marzuki Wahid, (ed), 1999:14) bahwa pondok pesantren merupakan latar belakang pendidikan yang mampu membentuk pola pikir dan perilaku santrinya. Pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Kekhususan pesantren disbanding dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya adalah para santri atau murid”tinggal bersama dengan kyai atau guru mereka dalam suatu kompleks tertentu yang mandiri, sehingga dapat menumbuhkan ciri-ciri khas pesantren, seperti:

- a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dan kyai;

- b. Santri taat dan patuh kepada kiyainya;
- c. Para santri hidup secara mandiri dan sederhana;
- d. Adanya semangat gotong-royong dalam suasana penuh persaudaraan;
- e. Para santri terlatih hidup berdisiplin dan tirakat.

Perjalanan dan perkembangannya, pada pondok pesantren semakin mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Sehingga saat ini kita dapat melihat ada bermacam-macam tipe pendidikan pesantren. Secara garis besar, lembaga-lembaga pesantren pada dewasa ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu :

- a. Pesantren Salafi, yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren.
- b. Pesantren Khalafi, yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren (Dhofier, Zamakhsyari. 1990:41).

Lembaga pendidikan pesantren memiliki ciri khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Pada umumnya kehidupan di dunia pesantren akan tergambar dalam kegiatan para kyai dan santri melalui peran dan fungsinya masing-masing.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia pesantren telah memiliki peranan yang cukup besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlak mulia dan mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa

melalui pendidikan informal, nonformal, dan pendidikan formal yang diselenggarakannya. Secara informal lembaga pesantren di Indonesia telah berfungsi sebagai keluarga yang membentuk watak dan kepribadian santri. Pesantren juga telah melaksanakan pendidikan keterampilan melalui kursus-kursus untuk membekali dan membantu kemandirian para santri.

Selain itu, lembaga pesantren muncul sebagai tantangan zaman dari desakan masyarakat Islam yang masih tradisional untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Kemunculan pesantren awalnya dalam bentuk yang sederhana tetapi ternyata dalam perkembangannya telah memberikan investasi bernilai luar biasa pada kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama di Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut misalnya dibuktikan dengan lingkungan kehidupan sosial budaya, berekonomi, berpolitik, beragama dan bidang kehidupan lainnya dari kelompok masyarakat Islam tradisional sekalipun dibandingkan dengan masyarakat Islam modern saat ini.

F. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Power juga dapat ditafsirkan bahwa power merupakan kecakapan mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi supaya mengikuti kemauan dan kepentingan yang diinginkan. Power terdiri atas tiga hal yaitu: *Decision Making (Direct)*, *Agenda Setting (Indirect)*, *Thought-Control (Tanpa sadar)*.

2. Definisi Operasional

- a. *Agenda Setting (Indirect)*. Kekuasaan (*power*) dalam bentuk model *agenda setting (indirect)* seperti ini bersifat tidak langsung, bentuk model seperti inipun condong memiliki sifat politis yang besar, mengapa dikatakan demikian karena bentuk model ini lebih untuk mempengaruhi dalam kebijakan agar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan minatnya.
- b. *Decision Making (Direct)*. bisa terasa dan dapat dilihat secara nyata atau dapat dikatakan kekuasaan (*power*) seseorang memiliki sifat langsung (*direct*) terhadap orang lain karena dasar utama kuasa yang ia miliki. Cukup sederhana untuk cara kerjanya dan bersifat nyata.
- c. *Thought-Control (Tanpa sadar)* Kekuasaan (*power*) pada bentuk pola ini berbeda dengan pola sebelumnya, karena pada pola kali ini kian bertambah lembut dan tidak dapat dirasai, dapat dikatakan juga kekuatan untuk mempengaruhi lebih dalam langsung secara inti baik secara ideologis yang dirancang hingga mendalam dengan kekuatan yang menghegemoni sedemikian rupa.

G. Metode Penelitian

Penelitian metodologi berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi untuk panduan berfikir yang sistematis supaya mampu memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan deskriptif kualitatif yaitu pengawasan dan penyelidikan yang menggambarkan secara tajam dalam penganalisisan untuk memperoleh data terhadap masalah yang terjadi di daerah kelompok atau di lokasi tertentu yang akan diteiti (Ruslan: 2004).

Penelitian ini menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan data berupa angka-angka kuantitatif untuk dapat menarik sebuah kesimpulan tentang bagaimana power pondok pesantren dalam perumusan alokasi dana keistimewaan. Menurut Nasir, M (1980) Tujuan dari menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, berupa gambar secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara suatu fenomena yang diselidiki berupa ciri-ciri sebagai berikut: Berusaha menggambarkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan dan melukiskan keadaan objek dan subyek penelitian. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisa, dalam bentuk tulisan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yaitu di Pondok Pesantren Krapyak.

3. Unit analisa data

Unit analisa dalam penelitian ini difokuskan pada subyek yang memahami langsung tema penelitian yakni peneliti akan mengkaji Power Pondok Pesantren Krapyak Dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan. Oleh karena itulah pihak yang terkait langsung antaranya adalah pihak pesantren Krapyak.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Moleong (2010), data primer merupakan Informasi/ data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Data primer digunakan untuk mengetahui fenomena penelitian secara mendalam dengan pendekatan terhadap obyek penelitian. Wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian ini salah satu narasumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu ketua pondok pesantren Krapyak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melalui laporan/buku/catatan/dokumen yang berkaitan

erat dengan permasalahan keadaan konsep penelitian erat dengan permasalahan penelitian yang dijadikan sebagai obyek penelitian, diantaranya tentang kebijakan pemerintah dalam perumusan alokasi dana keistimewaan. Data sekunder untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai acuan dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat pengumpulan data yang mendukung penelitian. Untuk memperoleh dataa yang relevan, digunakan cara pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan langsung serta pencatatan secara sistematis dan sengaja terhadap gejala-gejala yang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Wawancara itu sendiri merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial terpendam maupun manifest. Wawancara ini di lakukan dengan pihak pondok pesantren Krapyak untuk memperoleh data dan informasi yang di peroleh sesuai dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang ada dalam catatan atau pembukuan dari pondok pesantren maupun instansi dan lembaga yang berkaitan dalam penelitian ini.